

PARTISIPASI PUBLIK PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN WONOSOBO

Sri Haryanto & Lutfan Muntaqo

Email: sriharyanto@unsiq.ac.id, elfanemqi@gmail.com

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Abstrak

Pesantren dengan berbagai sumber dayanya merupakan modal sosial yang sangat penting bagi pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Wonosobo termasuk kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki pondok pesantren dengan jumlah ratusan dengan santri yang berjumlah puluhan ribu.

Partisipasi publik pesantren sangat penting dalam perencanaan, penyusunan, penyelenggaraan, hingga evaluasi pelayanan publik. Kenyataannya di Wonosobo, partisipasi ini masih sangat rendah meskipun tidak kosong sama sekali.

Salah satu penyebabnya adalah karena pesantren masih disibukkan dengan persoalan internal seperti penyesuaian kurikulum, pembekalan softskill bagi santri, persoalan infrastruktur dan sebagainya sehingga belum bisa terlibat banyak dalam urusan publik.

Artikel berbasis pengabdian masyarakat ini meneliti profil pesantren di Kabupaten Wonosobo, partisipasi publik yang dilakukannya, serta hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi publik pesantren.

Kata Kunci: *Pesantren, partisipasi publik, penguatan softskill santri, Wonosobo*

A. Pendahuluan

Perubahan peta social politik nasional yang ditandai dengan bergulirnya proses demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah mendorong tuntutan terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang mengarah pada terwujudnya praktek pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mampu mengurangi berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semangat demokratisasi melahirkan tuntutan pembagian kekuasaan (*power sharing*) yang ditandai dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat (*social participation*) dalam proses sosial politik. Desentralisasi telah mendorong terjadinya pembagian kewenangan (*authority sharing*) yang semakin nyata dengan menguatnya peranan daerah dan inisiatif lokal. Konsep pemerintahan yang baik yang mengemuka di penghujung abad ke-20 merupakan respon yang muncul dan berkembang di berbagai Negara untuk mengoreksi peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, korup dan kolusif, ke arah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta demokratisasi politik.¹

Dinamika perubahan yang amat cepat itu harus diikuti oleh penguatan kapasitas dan partisipasi dari masyarakat sipil/lembaga lokal (*pesantren* dan *majelis taklim*). Jika tidak, perubahan tersebut hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu, dan lagi-lagi masyarakat hanya jadi penonton. Tetapi jika perubahan tersebut dikelola dan diawasi dengan baik niscaya akan memberikan peluang bagi semakin baiknya pelayanan pemerintah, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan kondisi sosial politik menjadi semakin stabil. Kegagalan menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan akan membawa dampak pada kualitas kehidupan. Siapapun yang memiliki fleksibilitas dalam proses perubahan akan mampu meningkatkan kemampuan diri serta menyesuaikan diri dalam proses perubahan yang akan terus berlangsung.²

Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah yang cukup strategis baik dilihat dari sudut geografis maupun tata sosial masyarakatnya yang memiliki kultur religius yang sangat kuat. Tumbuh suburnya majlis taklim dan pesantren di berbagai pelosok sebagai bukti pengejawantahan kultur religius Wonosobo. Kultur religious ini merupakan potensi terpendam untuk dijadikan amunisi

¹ Sjahrudin Rasul, "Penerapan *Good Governance* di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *MIMBAR HUKUM* Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009. Hlm. 538

² Dion Yoga Prastowo, "Penyesuaian Diri Pegawai dalam Menghadapi Perubahan Organisasi," Naskah Publikasi Tesis, Program Magister Psikologi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. Hlm. 18

dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Sebagai kultur yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, majlis taklim dan pesantren bisa dijadikan mediator untuk menciptakan penguatan partisipasi dan pemberdayaan pada masyarakat sipil.

Di Kabupaten Wonosobo terdapat ratusan Pondok Pesantren yang sebagian besar tersebar di daerah pedesaan, namun patut disayangkan partisipasi publik lembaga lokal (majlis taklim dan pesantren) dalam mengontrol (mengawasi) kebijakan publik pemerintah daerah dalam hal pencapaian *good governance* masih cukup rendah, bahkan selama ini terkesan acuh. Padahal Partisipasi masyarakat (lembaga lokal) dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Aspirasi masyarakat apabila diakomodir dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif.³

Survei yang dilakukan Humanika Institute pada 2014 lalu memaparkan fakta rendahnya keterlibatan partisipasi lembaga local (majlis taklim dan pesantren) di Kabupaten Wonosobo, survey menunjukkan 70% responden mengaku tak pernah dilibatkan sama sekali dalam perencanaan, penyusunan, penyelenggaraan, hingga evaluasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sipil yang sangat rendah ini disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap hak-hak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini menjadi celah aktivitas calo-calo yang bersimbiosis mutualisme atau berhubungan saling menguntungkan dengan penyelenggara pelayanan publik.

Artikel ini merupakan hasil dari tugas pengabdian masyarakat yang menggunakan metode pemberdayaan masyarakat dengan fokus meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan publik. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi di mana peneliti mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian, Wawancara yang merupakan proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Selanjutnya data juga diperoleh melalui proses Focused Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan bersama

³ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan," *Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015. Hlm. 161

para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Wonosobo untuk mengeksplorasi masalah dan Pemecahannya terkait peran Pesantren dalam partisipasi Publik di Kabupaten Wonosobo.

Berdasar latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah 1) Bagaimana gambaran pesantren di Kabupaten Wonosobo? 2) bagaimana peran dan partisipasi publik pesantren di Kabupten Wonosobo?

B. Partisipasi Publik

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:19) pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat nya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Vincent Gaspers menyatakan bahwa secara konvensional kualitas pelayanan publik digambarkan oleh karakteristik suatu produk seperti kinerja (performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (easy to use), estetika (esthetics), dan lain sebagainya.⁴ Namun seringkali pengukuran kualitas pelayanan publik tersebut hanya dari satu sisi saja yaitu dari pihak yang menyelenggarakan layanan dan tidak melakukan pengukuran/melibatkan pihak yang diberi layanan (customers). Padahal kalau kita melihat definisi strategis dari kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa citra atau layanan publik lebih tepat ditinjau dari sudut pandang pelanggan yang membandingkan antara *expective service* (layanan yang diharapkan) dengan *perceived*

⁴ Rahman Mulyawan, "*Birokrasi dan Pelayanan Publik*," (Bogor: UNPAD Press, 2016), hlm. 3

service (layanan yang diterima). Sehingga setidaknya ada lima dimensi yang menjadi titik perhatian pengguna layanan dalam menilai suatu layanan, yaitu:⁵

1. *Tangible* yang meliputi antara lain fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi
2. *Emphaty* yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan
3. *Responsiveness* yaitu keinginan penyelenggara layanan untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap
Reliability yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, kehandalan dan memuaskan
4. *Assurance* yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh unit yang menyelenggarakan layanan.

C. Pesantren di Wonosobo

Wonosobo bisa disebut kota santri mengingat banyaknya pondok pesantren yang tersebar di sana. Memang kebanyakan pesantren di Wonosobo ada di daerah pedesaan meskipun ada beberapa pesantren yang terletak di daerah perkotaan seperti pondok pesantren Al-Manshur di Kelurahan Wonosobo Barat kecamatan Wonosobo kota.

Pesantren tertua di Wonosobo adalah Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah yang terletak di desa Kalibeber kecamatan Mojotengah. Peantren ini didirikan oleh Raden Hadiwijaya yang menggunakan nama samaran KH. Muntaha Bin Nida' Muhammad (1832-1860). Beliau merupakan pengawal pangeran Diponegoro. Setelah melalui beberapa generasi, tepatnya pada generasi ke empat yaitu era kepemimpinan KH. Muntaha Al-Hafidz bin KH Asy'ari atau lebih dikenal dengan nama Mbah Mun, pesantren ini mengalami kemajuan pesat, baik dalam jumlah santri maupun lembaga-lembaga pendidikannya.⁶

Ribuan santri alumni pesantren Al-Asy'ariyyah kemudian berkembang di berbagai daerah termasuk di sekitar desa Kalibeber. KH. Arifin Shiddiq, KH. Nashoha, KH. Ahmad Zuhdi, dn KH. Mukromin

⁵ <https://www.kanal.web.id/pengertian-pelayanan-publik> diakses pada 20-11-2020

⁶ <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/178817/pesantren-tertua-di-wonosobo-cetak-ribuansantri#:~:text=Terdatat%20sebuah%20pondok%20pesantren%20dengan,telah%20berdiri%20sejak%201832%20silam.> Diakses pada 20-11-2020

merupakan santri Mbah Mun yang kemudian mendirikan pesantren di desa Kalibeber dan sekitarnya di kecamatan Mojotengah.

Total jumlah pesantren di Wonosobo yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo dan memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) ada sejumlah 175 dan tersebar di 15 kecamatan di kabupaten Wonosobo. Pesantren-pesantren terdiri dari tiga tipologi yaitu salaf, modern, dan semi modern atau dalam istilah lain pondok pesantren salafiyah, kholafiyah dan campuran.⁷ Sedangkan total jumlah santri di Wonosobo berdasarkan data terakhir di Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama RI adalah 16.486 yang terdiri dari 12.323 santri mukim dan 4.163 santri tidak mukim atau santri *kalong*.⁸

Sebagai lembaga kemasyarakatan pesantren memiliki keunggulan komparatif pada aspek SDM, demografi, ekonomi dan sosial yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Aspek tersebut menjadi ciri pesantren dan menjadi kekuatan yang menonjol, terutama ketika ada kebutuhan massa dalam jumlah besar misalnya pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk menanam dan memelihara lingkungan yang dapat dipenuhi oleh pesantren. Faktor keunggulan lain yang dimiliki pesantren di antaranya adalah letak pesantren yang berada langsung di tengah masyarakat dengan lokasi di semua tempat (daerah pantai, pegunungan, pertanian dan tepi sungai), jumlah lembaga pesantren banyak dengan organisasi yang jelas, dan memiliki Kyai atau Pengasuh yang karismatik dengan jumlah santri dan *mustami*' yang banyak.⁹

Jadi sebenarnya Wonosobo dengan jumlah pesantren dan santri yang signifikan tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan daerah. Maka partisipasi publik dari pesantren tersebut sangat diperlukan dan harus dikelola dengan baik.

D. Pesantren dan Partisipasi Publik di Wonosobo

Pesantren adalah lembaga da'wah dan lembaga sosial kemasyarakatan, yang memberikan warna dan corak khas dalam wajah masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Penguatan peran

⁷ Deperteman Agama RI-Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Jakarta: Deperteman Agama RI, 2003), hlm. 29-31

⁸ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=33> diakses pada 21-11-2020

⁹ Dian Diniyati, Eva Fauziyah & Budiman Achmad, "Potensi dan Peran Pesantren sebagai Lembaga Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)," *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 7 No. 1 Maret 2010. Hlm. 52

pesantren terhadap pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan merupakan tuntutan era globalisasi dan reformasi yang telah dicanangkan oleh masyarakat Indonesia berbasis pada titik sentral pada rakyat (*people centered development approach*). Hal ini setidaknya, dalam rangka untuk menghadapi krisis ekonomi, keuangan, ketahanan pangan yang berefek pada krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah.¹⁰ Dalam Konteks ini, pesantren memiliki peluang untuk mengembangkan *civil society*.

Pada tataran institusional, bagaimanapun harus diakui bahwa akar-akar *civil society* di Indonesia sudah ada, sekalipun sangat sederhana, seperti lembaga-lembaga *intermediary* antara negara dan masyarakat, baik yang bersifat tradisonal maupun modern. Pada tataran ini hendaknya diupayakan tentang bagaimana mengembangkan lembaga-lembaga tersebut menjadi semakin mencakup kemampuan-kemampuan yang semakin rasional, sehingga dapat melakukan kontak, komunikasi atau *networking* dengan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga yang ada di luar.¹¹

Bagi masyarakat Islam pedesaan, pesantren memegang peranan untuk membentengi umat dan cita-cita Islam terhadap ancaman kekuatan-kekuatan struktural dari luar. Pengasuh pesantren (kyai) dipandang sebagai pemimpin kharismatik dalam bidang agama dan kemasyarakatan. Walaupun masih ada orang yang menggolongkan mereka sebagai komunitas yang anti gagasan kemajuan (*the idea of progress*), namun mereka dinilai fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran-pikiran umatnya. Sifat mereka terus terang dan berani dalam bersikap dan sebagai seorang ahli agama, mereka jauh lebih unggul dari para penguasa (*umara*).¹²

Oleh sebab itu, sejalan dengan upaya penguatan masyarakat, pesantren memiliki peluang yang besar. Sebab, lembaga seperti pesantren memainkan peranan yang penting dalam mengartikulasikan, membela dan memperluas reformasi sosial melalui program-program yang berhubungan dengan pendidikan, dan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan. Sebab, masyarakat Indonesia pada umumnya beragama Islam, membutuhkan

¹⁰ M. Bashori Muchsin dan -Yuli Andi Gani dan M. Irfan Islamy, Upaya Pondok - Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, *Wacana*, Vol. 12 No. 2 April 2009, hlm. 375

¹¹ Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKIS, 2000, hal. 45-46.

¹² Muhammad AS Hikam, "Pengantar" dalam Drs. H. Ali Maschan, M.Si, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, Surabaya: Lepkiss, 1999, hal. viii.

bimbingan rohaniah yang dapat dipenuhi oleh pesantren dan kiainya sebagai pusat pendidikan dan aktivitas spiritual. Mereka membutuhkan guru dan pemimpin yang bisa dimintai pertimbangan, meminta keputusan tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Dan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, sumber kepemimpinan informal, juga menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan yang sudah barang tentu mengandung berbagai kemungkinan untuk menjalankan peranan yang lebih luas,¹³ termasuk memberdayakan masyarakat (*civil society*).

Dari hasil FGD ditemukan fakta bahwa peran-peran pemberdayaan pesantren di Wonosobo masih minim. Padahal, menurut hemat penulis, banyak hal-hal yang dapat dilakukan pesantren untuk melakukan pemberdayaan tersebut. Sebagaimana di ketahui bahwa keberadaan pesantren memang cukup diperhitungkan oleh masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat selama ini pesantren disamping dikenal sebagai lembaga pendidikan juga lebih akrab dianggap sebagai institusi 'kawah candradimuka' yang berfungsi menempa moral dan akhlak para santri yang belajar di dalamnya. Dengan adanya kemajuan teknologi dengan segala dampaknya –terutama dampak dekadensi moral—menjadikan masyarakat mejatuhkan pilihan untuk 'menitipkan' anaknya di lembaga pesantren tersebut. Mereka berharap di lembaga ini sang anak ditempa sedemikian rupa sehingga relatif tidak terkontaminasi oleh dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Apalagi perkembangan media sosial yang tidak terkendali di mana otoritas keilmuan seakan tidak lagi menjadi pertimbangan. Ketidakhati-hatian dalam mengakses media sosial akan menjadikan pola pikir yang keliru dalam memahami ajaran-ajaran agama.¹⁴

Berdasar diskusi di FGD ditemukan kendala bahwa kebanyakan pesantren tidak membekali para santrinya dengan berbagai keilmuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh mereka di masyarakat masing-masing. Idealnya, pesantren melalui figur sentralnya (Kyai) harus pula berinisiatif memberikan pendidikan tambahan selain pendidikan agama yang selama ini diberikan sebagai wujud kepeduliannya terhadap realitas yang ada di lingkungannya. Pesantren bisa saja membuat program pembelajaran untuk merespon kemajuan teknologi, misalnya dengan mengajarkan ketrampilan komputer, montir, elektronika atau upaya mengembangkan teknologi

¹³ M. Dawam Rahardjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan" dalam M. Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 10

¹⁴ Wawancara KH. Ahmad Zuhdi, Pengasuh Ma'had Mamba'ul Qur'an Munggang Mojotengah Wonosobo pada 16-12-2020

informasi. Namun dapat membuat perencanaan pendidikan tambahan yang diarahkan pada aktualisasi diri para santri ketika sudah terjun di masyarakat mereka masing-masing, seperti memberi bekal untuk mengembangkan ketrampilan berdagang, bertani, berkebun, beternak, bertukang dan lain sebagainya.

Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh pesantren manakala mereka mau membuka diri dengan cara bekerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga terkait dan ada kemauan yang kuat –terutama para pengasuhnya-- untuk merealisasi gambaran ideal tersebut. Jika hal dapat dilakukan maka pesantren di samping tetap berfungsi sebagai lembaga yang dapat ‘membentengi’ moral masyarakat, mereka juga dapat melakukan pemberdayaan masyarakat (*civil society*) melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan penguatan internal melalui pembekalan keilmuan dan ketrampilan praktis bagi para santrinya, maka daya tawar alumni pesantren menjadi lebih baik dan tidak hanya dikesankan sebagai ahli ilmu agama saja melainkan menguasai ketrampilan-ketrampilan lain. Dengan itu pula maka partisipasi publik oleh pesantren menjadi lebih meningkat. Ketika pesantren sudah mapan secara kelembagaan dan tidak lagi disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, maka ia bisa meningkatkan fokusnya pada hal-hal lain seperti pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta melibatkan diri dalam perencanaan, penyusunan, penyelenggaraan, hingga evaluasi pelayanan publik. Dalam konteks Wonosobo peran tersebut belum maksimal dan masih harus dikuatkan.¹⁵

E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Partisipasi publik pesantren terhadap perumusan kebijakan daerah di Wonosobo masih sangat minim karena memang pesantren belum banyak dilibatkan. Kurangnya partisipasi aktif pesantren juga disebabkan karena mereka masih sibuk dengan urusan internalnya sehingga perhatian terhadap hal tersebut belum maksimal.
2. Untuk penguatan pesantren diperlukan pembekalan keterampilan praktis seperti ketrampilan berdagang, bertani, berkebun, beternak, bertukang dan lain sebagainya di luar pengajaran keilmuan agama agar

¹⁵ Wawancara KH. Arifin Shiddiq, Pengasuh Pesantren Safinatunnaja Kalibeber Mojotengah Wonosobo pada 15-12-2020

alumni pesantren siap terjun di masyarakat dengan bekal tersebut. Jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah diperlukan guna kepentingan ini. Di sini diperlukan peran perantara yang bisa menghubungkan pesantren dengan dinas-dinas atau instansi terkait seperti dinas pertanian, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. Perguruan tinggi bisa menjadi lembaga penghubung dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Deperteman Agama RI-Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Jakarta: Deperteman Agama RI, 2003).
- Dian Diniyati, Eva Fauziyah & Budiman Achmad, "Potensi dan Peran Pesantren sebagai Lembaga Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)," *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 7 No. 1 Maret 2010.
- Dion Yoga Prastowo, "Penyesuaian Diri Pegawai dalam Menghadapi Perubahan Organisasi," Naskah Publikasi Tesis, Program Magister Psikologi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan," *Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015.
- Muhammad AS Hikam, "Pengantar" dalam Drs. H. Ali Maschan, M.Si, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, Surabaya: Lepkiss, 1999.
- M. Bashori Muchsin dan -Yuli Andi Gani dan M. Irfan Islamy, Upaya Pondok -Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, *Wacana*, Vol. 12 No. 2 April 2009.
- M. Dawam Rahardjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan" dalam M. Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Rahman Mulyawan, *"Birokrasi dan Pelayanan Publik,"* (Bogor: UNPAD Press, 2016).
- Sjahrudin Rasul, "Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *MIMBAR HUKUM* Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009.
- <https://ditpdpontren.kemenag.go.id>
- <https://www.kanal.web.id>
- <https://www.suaramerdeka.com>
- Wawancara:
- KH. Ahmad Zuhdi, Pengasuh Ma`had Mamba`ul Qur`an Munggang Mojotengah Wonosobo
- KH. Arifin Shiddiq, Pengasuh Pesantren Safinatunnaja Kalibeber Mojotengah Wonosobo